

HATTA. ISLAM DAN NEGARA

Zulfikri Suleman

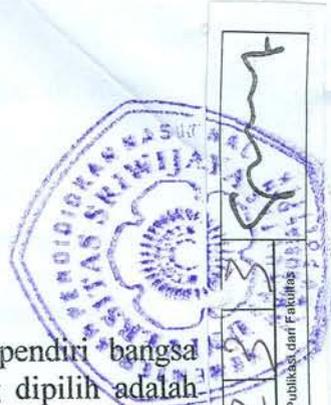
Abstraks

Tulisan ini ingin membahas pemikiran salah satu bapak pendiri bangsa Indonesia yang utama, Mohammad Hatta (1902-1980). Topik yang dipilih adalah "Hatta, Islam dan Negara", yang menjelaskan bagaimana kaitan negara dan Islam dalam pandangan Hatta. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi konsep kenegaraan Hatta serta menandai tempat Islam dalam bangunan kenegaraan Hatta tersebut. Sepanjang menyangkut dua konsep "Islam dan Negara" ini, kita menemukan dua hal yang seolah-olah bertentangan dalam diri Hatta. Pertama adalah Hatta sebagai penganut Islam yang taqwa, yang ketaqwaannya menurut Nurcholish Madjid bersifat substantif. Kedua adalah Hatta yang berinisiatif membuang tujuh kata terakhir dalam rumusan Piagam Djakarta ("dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya") dalam sidang penentuan dasar negara tahun 1945, yang berakibat pupusnya kemungkinan sedari awal untuk mewujudkan Indonesia merdeka sebagai negara Islam. Tulisan ini didasarkan pada bahan tertulis karya Hatta sendiri mau pun tulisan orang lain tentang Hatta. Dengan metode penalaran logis (*logical reasoning*), ingin dikemukakan bahwa wujud Islam dalam kehidupan bernegara, bagi Hatta, tercermin dalam sikap dan perilaku para penyelenggaranya dan umat yang menganut ajaran Islam ini, bukan pada kelembagaannya. Bagi Hatta, sumbangan Islam dalam kehidupan bernegara terletak pada terwujudnya tatanan demokrasi yang damai, berkeadilan dan penuh persaudaraan antar umat manusia. Negara pengurus (demokrasi sosial) adalah titik pertemuan Islam dan negara dalam pandangan Hatta.

1. Pendahuluan

Sejarawan Sartono Kartodirdjo pernah mengemukakan¹, identitas atau kepribadian suatu bangsa terkubur dalam sejarah masa lalu bangsa tersebut, dalam bentuk semangat kejuangan, pemikiran, sikap dan perilaku keteladanan para bapak pendiri bangsa (*founding fathers*). Dengan kata lain, para anak bangsa wajib memahami semangat perjuangan, pemikiran dan perilaku keteladanan para pejuang

¹ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, jilid 2 (Jakarta: Penerbit Gramedia), 1990, hal. XV.



0	8	0	2	0	9	0	1	1	0	2	0	2	3
Kode Fakultas	Kode PS/Bagian	Kode Publikasi	Kode Penulis	Tahun Publikasi	Kode Sumber Tulisan	Nomor urut Publikasi dari Fakultas							

kemerdekaan agar identitas kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya di masa globalisasi yang penuh tantangan seperti sekarang ini, dapat terus dijaga. Tulisan ini ingin membahas pemikiran salah satu bapak pendiri bangsa Indonesia yang utama, Mohammad Hatta (1902-1980). Topik yang dipilih adalah “Hatta, Islam dan Negara”, yang menjelaskan bagaimana kaitan negara dan Islam dalam pandangan Hatta. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi konsep kenegaraan Hatta serta menandai titik pertemuan Islam dan negara sebagaimana dipahami oleh Hatta.

Islam dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara di negara kita merupakan topik yang senantiasa relevan untuk dibicarakan. Meskipun perjuangan konstitusional untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia sudah kehilangan momentum historisnya sejak tahun 1950an, sebagai ekspresi dari kenyataan sosiologis dominasi Islam di negara kita, senantiasa muncul anasir-anasir Islam yang memajukan *appeal* tentang Indonesia yang berdasarkan Islam. Kecenderungan munculnya aksi-aksi teroris dan gerakan radikal berlatar Islam sejak enam tahun belakangan ini mengingatkan kita bahwa usaha-usaha untuk mewujudkan Indonesia yang berdasarkan Islam belum sepenuhnya padam di tanah air kita. Oleh sebab itu, demi mempertahankan keutuhan bangsa dan kesinambungan pembangunan nasional, amat penting bagi kita untuk memahami bagaimana bapak pendiri bangsa (*founding fathers*) di masa lalu mengelola interaksi antara Islam dengan kehidupan bernegara ini.

Dikaitkan dengan kedua konsep ini, yaitu “Islam” dan “negara”, kita menemukan kecenderungan yang seolah-olah bertentangan secara diametral dalam diri Hatta. Yang pertama adalah Hatta sebagai penganut Islam yang taqwa dan

substantif, sebagaimana diistilahkan Nurcholish Madjid. Di lain pihak, adalah Hatta yang mengambil inisiatif membuang kata-kata "... dengan kewajiban menjalankan syari'ah Islam bagi pemeluknya" dalam rumusan Piagam Djakarta pada tahun 1945, yang dengan demikian memupus harapan sejak dini pembentukan negara Indonesia merdeka yang diwarnai oleh ajaran Islam. Tujuan penghapusan kata-kata tersebut adalah untuk mengakomodasi tuntutan utusan bangsa Indonesia yang beragama Kristen dari wilayah Indonesia Timur, demi mempertahankan persatuan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Dengan kata lain, bagi Hatta, khususnya di masa itu, mempertahankan persatuan bangsa lebih penting ketimbang menampakkan dominasi legal-formal Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengapa Hatta yang menerapkan ajaran Islam secara nyaris *kaffah* justru menolak Indonesia merdeka yang berdasarkan Islam dan lebih memilih dasar Pancasila? Apa makna Islam bagi Hatta dalam konteks kehidupan bernegara? Makalah ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan data dari tulisan-tulisan Hatta sendiri yang begitu banyak mau pun dari tulisan-tulisan orang lain tentang Hatta.

2. Agama dan Negara

Hubungan antara agama dengan negara sudah lama menjadi topik kajian para pemikir. Kita bisa menduga, lantaran para penyebar agama sekaligus adalah pemimpin dalam masyarakat, fenomena perhimpitan peran antara penguasa agama dan penguasa politik, yang dengan demikian juga perebutan pengaruh di antara keduanya, sudah berlangsung sejak jaman nabi-nabi. Tapi sebagai satu fenomena

diperdebatkan, yang kemudian menimbulkan kebutuhan untuk memisahkan tersebut², masalah hubungan antara agama dan negara sudah dipikirkan sejak Pertengahan. Secara sederhana dapat dikemukakan, hubungan antara agama dan negara atau antara penguasa agama dan penguasa politik, berdasarkan derajat pengaruhnya terhadap yang lain, merupakan hubungan dikhotomis³. Pada titik kutub yang satu adalah hubungan *religio-political power* yang bersifat organik, yang menyatukan kehidupan agama dengan kehidupan politik dengan alasan bahwa kehidupan agama bersifat holistik, mencakup semua aspek kehidupan manusia. Dalam kehidupan bernegara, hubungan seperti ini mewujud ke dalam sistem teokrasi sebagaimana dianut negara-negara monarkhi di Eropa di Abad Pertengahan atau Iran pada masa sekarang.

Pada titik kutub yang lain adalah sistem kenegaraan yang memisahkan sama sekali kehidupan agama dari kehidupan politik, yang mewujud ke dalam sistem kenegaraan sekuler sebagaimana dianut negara-negara demokrasi sekarang ini. Bukan kebetulan bahwa sifat sekuler ini dianut oleh negara-negara demokrasi ini karena hal ini sesuai dengan salah satu prinsip demokrasi bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi individual yang tidak boleh dicampuri oleh penguasa politik, salah satu prinsip demokrasi yang lahir dari gerakan reformasi agama Katolik pada abad ke-16. Semua negara di dunia ini, dalam hal pengaruh agama terhadap kehidupan politik, dapat di tempatkan pada titik-titik di antara dua kutub ini, lebih dekat ke ciri

² Dari sudut pandang lain, Ibn Khaldun dan Machiavelli berpendapat bahwa agama justru memberi kontribusi positif bagi Negara; lihat Barbara Freyer Stowasser, "Agama dan Perkembangan Politik: Antara Ibn Khaldun dan Machiavelli", Bagian Pertama, *Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. V, Tahun 1994, hal. 89.

³ Ini pendapat Donald Eugene Smith, dikutip dari Zainuddin Maliki, "Menatap Masa Depan Politik Islam di Indonesia", *DIALOG*, edisi I Tahun 2004, hal. 1.

negara teokrasi atau lebih dekat ke ciri negara sekuler. Perhatikan garis dikhotomis di bawah ini:

teokrasi _____ sekuler

Pengalaman Indonesia sendiri di masa sistem demokrasi parlementer (1950-1959) menunjukkan tarik-menarik antara kekuatan politik yang menghendaki Negara berdasarkan Islam berhadapan dengan kekuatan politik sekuler yang memilih dasar Pancasila. Tarik-menarik ini terjadi dalam perdebatan di Konstituante dalam penyusunan dasar negara pascapemilu tahun 1955. Sebagaimana diketahui, perdebatan ini berlangsung dengan sengit dan akhirnya menemui jalan buntu. Proses ini kemudian berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945.

Bahtiar Effendy mengemukakan⁴, pendekatan dikhotomis-organik oleh Smith di atas, sepanjang menyangkut hubungan Islam dengan negara, khususnya di Indonesia, memiliki kelemahan dalam arti bersifat monolitik. Di lain pihak, doktrin Islam dalam hubungannya dengan negara bersifat poliinterpretasi, sehingga pendekatan dikhotomis-organik di atas mengalami kesulitan dalam menjelaskan alasan-alasan pilihan politik pemilih Islam yang beraneka ragam. Bagaimana misalnya menjelaskan Hatta yang taqwa justru menjatuhkan pilihannya pada Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bukan Indonesia yang berdasarkan Islam?

⁴ Bahtiar Effendy, "Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia", *PRISMA* No. 5, Mei 1995, hal. 5.

Dalam konteks ini perlu diamati penilaian dari Deliar Noer tentang sikap politik umat Islam di Indonesia, khususnya Hatta. Menurut Deliar Noer⁵, meskipun secara prinsip mengakui kaitan Islam dengan kehidupan politik, salah satu pandangan yang dianut di Indonesia di mana Hatta termasuk di dalamnya adalah bahwa Islam lebih merupakan ajaran tentang hidup bermasyarakat yang tidak perlu diikuti dengan keterlibatan dalam kehidupan politik, apalagi dengan mengingat sifat masyarakat Indonesia yang amat plural. Yang lebih penting adalah bahwa sebanyak mungkin orang Islam perlu berbuat baik dan beramal secara maksimal dalam kehidupan bersama, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan bernegara. Apabila hal ini tercapai, bukankah ini sama dengan wujudnya pengaruh Islam dalam kehidupan bernegara?

3. Hatta dan Islam

Hatta pertama-tama adalah seorang penganut Islam. Setelah itu baru datang pengaruh lain atas dirinya: masa pendidikan formalnya sampai tahun 1931; pemahamannya tentang bangsa Indonesia yang plural, terjajah dan terkebelakang; serta pengalaman perjuangannya di masa-masa selanjutnya. Hatta mempelajari Islam, menghubungkannya dengan kenyataan jaman pada masa itu dan kemudian menafsirkannya secara subyektif, sesuai dengan apa yang diyakininya secara individual. Semua ini kemudian mengkrystal dalam pandangan Hatta yang khas tentang Islam, yaitu Islam yang identik dengan perdamaian, keadilan dan

⁵ Deliar Noer, "Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas", *PRISMA* No. 5, Tahun XVII, 1988, hal. 20.

persaudaraan antar sesama umat manusia. Bagaimana Hatta sampai pada kesimpulan tentang Islam seperti ini?

Hatta sudah sejak dini mendalami Islam secara serius. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa simpul interaksi Hatta dengan Islam. Pertama adalah pengenalan awal dengan Islam melalui didikan dalam keluarga di Bukittinggi. Pada masa awal ini, Hatta kecil mendapat pendidikan agama dari keluarga ayahnya yang memang merupakan tokoh tarikat yang berpengaruh di masanya. Terutama yang perlu disebutkan di sini adalah ajaran dari Paman Arsyad, kakak ayahnya. Dari paman Arsyad ini, Hatta diperkenalkan pada pemahaman tentang dasar-dasar agama, tentang iman dan tauhid. Hatta sejak usia tujuh tahun sekali dalam enam bulan diizinkan berkunjung ke keluarga ayahnya di Batu Hampar. Setiap berkunjung, Hatta selalu bertemu dengan paman Arsyad. Pada saat-saat seperti inilah Hatta menanyakan sesuatu dan, melalui jawaban-jawaban yang diterimanya, kemudian memperoleh wejangan agama dari pamannya itu. Inti ajaran agama dari pamannya ini berkisar pada tiga keyakinan: Allah itu Maha Kuasa, Allah itu pencipta alam semesta, dan Allah itu wujud dalam apa saja (*God is All*). Oleh sebab itu, manusia harus menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan dengan berbuat baik terhadap sesama. Apabila kita sudah percaya pada Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap apa pun dan siapa pun. Kita juga tidak perlu merasa sedih dengan berbagai cobaan hidup karena Tuhan senantiasa bersama kita. Demikianlah kira-kira wejangan agama paman Arsyad kepada Hatta, yang disampaikan dengan cara sedemikian rupa dan yang

membuat Hatta merasa terkesan. Menanggapi cara-cara pamannya ini dalam menyampaikan nasihat-nasihat agama, Hatta mengomentarnya sebagai berikut⁶:

“As an expert in the Brotherhood he knew that a child's brain should not be burdened with complicated religious learning. However, he was very clever in introducing Islamic teachings to me in a simple way, which have stuck in my mind ever since” (Sebagai seorang ahli tarikat ia tahu bahwa otak anak kecil tidak boleh dibebani dengan pengajaran agama yang rumit. Tapi ia amat pintar dalam memperkenalkan ajaran-ajaran agama kepadaku, yang sejak itu terus tertanam dalam pikiranku).”

Tidak diragukan lagi, dasar-dasar pendidikan agama yang hakiki yang diterima Hatta sejak kecil, khususnya dari paman Arsyad, telah membentuk Hatta menjadi pribadi yang takwa, tawakal dan tawaddu'. Sikap beragama yang substantif ini kemudian tercermin dalam perilaku sehari-hari di sepanjang hidupnya, yaitu melaksanakan ajaran agama sebagaimana mestinya: mengerjakan shalat lima waktu setiap hari, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan naik haji ke Mekah. Di samping itu, kepribadian Hatta juga pekat dengan nilai-nilai keislaman: bermoral, sabar, sederhana, jujur dan bersih. Ini barangkali dapat menjelaskan dua hal kepada kita. Pertama, usaha Hatta nantinya yang nyaris tanpa henti dalam menebarkan kebaikan kepada siapa saja dan kapan saja. Kedua, sikap sabar dan tawakal Hatta dalam menghadapi berbagai cobaan berat di masa-masa perjuangannya di kemudian hari seperti ketika dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Digul dan Banda Neira atau ketika menghadapi ancaman pembunuhan dari kempetai di masa pendudukan Jepang.

⁶ Mohammad Hatta, *Indonesia Patriot: Memoirs* (Singapore: Gunung Agung Pte. Ltd), 1981, hal. 15.

Kedua, pertemuan Hatta dengan H. Abdullah Ahmad (1878-1933), seorang guru agama dan salah satu dari tiga tokoh pembaharu Islam di Sumatera Barat, ketika Hatta menjadi pelajar MULO di Padang. H. Abdullah Ahmad adalah guru yang memberikan pelajaran agama Islam untuk para pelajar MULO. Pandangan umum tokoh-tokoh pembaharu ini adalah bahwa Islam harus disesuaikan dengan keadaan dunia modern dengan cara memperkenalkan ilmu pengetahuan Barat. Sedangkan penilaian atas baik-buruknya sesuatu – misalnya bunga bank – harus dilihat dari asas manfaatnya bagi kehidupan pribadi dan bersama. Mereka juga berusaha menanamkan pengertian tentang apa yang boleh dan yang dilarang (bid'ah) menurut Islam. Hatta mengakui, berkat ajaran para pembaharu ini, banyak kepercayaan animisme dan tahyul berhasil dibersihkan dari ajaran Islam di Minangkabau. Sebagaimana diketahui, Hatta adalah pribadi yang amat rasional, termasuk dalam beragama.

Proses pembelajaran selanjutnya dengan Islam dialami Hatta ketika ia menjadi pelajar sekolah menengah dagang (PHS) di Batavia. Salah satu kebiasaan Hatta dan teman-temannya di masa itu adalah menemui tokoh-tokoh senior dari siapa Hatta dan teman-temannya ingin belajar dan menimba pengalaman. Berbagai pertemuan dengan tokoh-tokoh ini tentu saja harus diartikan sebagai proses berguru bagi Hatta khususnya. Dari H.A. Agus Salim, misalnya, Hatta memperoleh wawasan mengenai sosialisme dan hubungan sosialisme dengan Islam, tanggungjawab kaum Islam terdidik dalam memajukan masyarakat serta sikap sebagian kaum terdidik yang kebarat-baratan. Di kemudian hari kita menyaksikan pemikiran Hatta tentang negara yang memadukan ajaran Islam dengan paham sosialisme ini.

Dari lukisan di atas dapat dilihat, Hatta memahami Islam secara hakiki, berawal dari keyakinan dasar tentang tauhid atau ke-Esaan Allah, yang intinya adalah pengakuan dan penghayatan penuh tentang kemutlakan kekuasaan Tuhan atas alam semesta ini. Allah juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini selanjutnya memberi bekal pemahaman tentang tugas dan tanggungjawab penganut Islam dalam kehidupan ini, yaitu menyelenggarakan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Bagi Hatta, tugas itu adalah berbuat baik sebanyak-banyaknya, khususnya mengusahakan perdamaian, keadilan dan persaudaraan bukan saja antar sesama umat Islam tapi juga antar kelompok umat manusia pada umumnya. Ini adalah nilai-nilai yang selalu disinggung Hatta tatkala ia membicarakan sumbangan dan peranan umat Islam dalam kehidupan bersama. Hatta sebaliknya sangat tidak menyukai perpecahan, hal yang disadarinya amat potensial terjadi pada bangsa Indonesia yang amat majemuk. Itulah sebabnya Hatta dengan penuh keyakinan berinisiatif menghapus tujuh kata di belakang sila "Ketuhanan" dalam rumusan Piagam Djakarta tahun 1945. Satu dekade kemudian, hal yang sama dilakukan Hatta. Dalam perdebatan di Konstituante mengenai dasar negara, Hatta menempatkan diri di kubu nasionalis sekuler berhadapan dengan kubu Islam.

Pemahaman Islam secara hakiki ini juga membekali Hatta dengan sifat-sifat taqwa, sabar dan tawakal. Sebab, Hatta menyadari benar bahwa suatu kejadian dalam kehidupan ini hanya berlaku dengan seijin Allah sebagai pencipta dan pemilik alam semesta ini. Kisah perjalanan hidup Hatta di kemudian hari, khususnya sebagai pejuang kemerdekaan dan pengayom masyarakat dengan segala suka dukanya, membuktikan Hatta sebagai hamba yang sabar dan tawakal serta sebagai khalifah

Tuhan yang senantiasa menebarkan kebaikan dan rahmat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

4. Hatta dan Negara

Hatta sudah sejak tahun 1927 memiliki gagasan tentang bentuk negara Indonesia merdeka, yaitu negara federal atau negara kesatuan yang demokratis. Gagasan prinsip ini tercermin secara lebih jelas dalam brosur *Ke Arah Indonesia Merdeka*, ditulis empat tahun kemudian. Kata Hatta⁷:

“Indonesia Merdeka haruslah suatu R e p u b l i k, yang bersendi kepada pemerintahan r a k y a t, yang dilakukan dengan perantaraan wakil-wakil rakyat atau Badan-badan Perwakilan. Dari wakil-wakil atau dari dalam Badan-badan Perwakilan itu terpilih anggota-anggota Pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara. Dan pemerintah ini senantiasa takluk kepada kemauan rakyat, yang dinyatakan atau oleh Badan-badan Perwakilan Rakyat atau dengan r e f e r e n d u m, keputusan rakyat dengan suara yang dikumpulkan”.

Dengan kutipan di atas, tidak sulit untuk menafsirkan bentuk negara dan corak pemerintahan yang diinginkan Hatta. Dengan mengacu khususnya pada kalimat ‘Dari wakil-wakil atau dari dalam Badan-badan Perwakilan itu terpilih anggota-anggota Pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara...’, yang diinginkan Hatta tidak lain daripada Indonesia merdeka yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Konsepsi Hatta tentang bentuk republik dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer ini untuk pertama kali diusahakan oleh Hatta melalui Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 3 Oktober 1945 dan Maklumat

⁷ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan (I)*, (Jakarta: Penerbit “Bulan Bintang), 1952, hal. 117.

Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 tentang anjuran untuk membentuk partai politik. Untuk masa empat tahun berikutnya Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi parlementer di mana Hatta mengambil peran aktif di dalamnya.

Di samping isu negara federal atau negara kesatuan yang demokratis, konkritisasi pemikiran Hatta mengenai kerangka kenegaraan ini terungkap jelas ketika sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 membicarakan rancangan undang-undang dasar. Dalam sidang tersebut terjadi pertarungan pemikiran yang seru antara Hatta dan Moh. Yamin dengan Mr. Soepomo yang dibantu oleh Soekarno. Pokok soalnya adalah pertentangan pendapat tentang persoalan apakah prinsip-prinsip dasar demokrasi yang harus dinikmati oleh setiap orang – kebebasan untuk mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan dan hak berkumpul dan berserikat – harus dijamin dalam UUD. Apabila Soekarno dan Soepomo menafikkan hak-hak individu dalam konstitusi, Hatta dan Moh. Yamin, sebaliknya, membela jaminan konstitusional hak-hak individu ini. Inti dari ungkapan Hatta adalah semacam penegasan bahwa komitmen untuk membangun negara (Indonesia) yang demokratis harus disertai dengan jaminan konstitusional tentang syarat-syarat adanya negara demokratis tersebut, yaitu hak seseorang untuk menikmati kebebasan dasarnya. Hatta selanjutnya mengkhawatirkan, bahwa jika tidak ada jaminan tersebut, arah yang dituju akan berbeda dari yang diinginkan semula: yang terjadi bukan kedaulatan rakyat, melainkan negara kekuasaan atau kedaulatan negara. Dengan kata lain, dalam proses penyusunan UUD 1945 tersebut, Hatta menjalankan dua peran sekaligus: sebagai konseptor hak-hak dasar warganegara sekaligus pemberi peringatan tentang bahaya

tentang kekuasaan negara yang terlalu dominan. Mengenai yang terakhir ini, Hatta telah menunjukkan kemampuannya untuk memperkirakan secara tepat apa yang akan terjadi kemudian. Artinya, kenyataan sejarah kemudian memang membuktikan kebenaran apa yang diprediksikan dan dikhawatirkan Hatta. Sebagaimana sudah kita saksikan dan rasakan bersama, selama lebih dari lima dasawarsa berikutnya, khususnya di masa pemerintahan Orde Lama yang otoriter dan Orde Baru yang totaliter, bangsa Indonesia merasakan betul apa artinya hidup sebagai warganegara di bawah rejim yang membungkam kebebasan atas nama kepentingan dan kekuasaan negara.

David Bouchier⁸, seorang ilmuwan Australia yang menulis disertasi tentang proses penyusunan undang-undang dasar dalam sidang-sidang BPUPKI ini, menggarisbawahi peranan penting Hatta dan tokoh-tokoh lain dalam memperjuangkan hak-hak individual warganegara, seperti ungkapan berikut ini:

"Itulah sekilas sejarah pembuatan UUD 1945. Untung ada Maria Ulfah yang memprotes Prof. Soepomo. Untung ada Mohammad Hatta yang menangkis Soekarno sehingga akhirnya dapat dimasukkan pasal-pasal yang menjamin kebebasan bicara dan berapat serta berserikat dalam UUD. Kalau tidak ada pasal-pasal tersebut, makin terpuruk keadaan bangsa Indonesia akibat dikuasai oleh negara dengan tiada rem".

David Bouchier nampaknya memang benar, bahwa untung ada Hatta, Maria Ulfah dan yang lain-lain, sehingga ketentuan-ketentuan penting mengenai perlindungan hak asasi manusia dan lain-lain berhasil dicantumkan dalam UUD,

⁸ Lihat A.M. Luthfi, "Refleksi Pemikiran Bung Hatta: Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan", dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Hatta), 2002, hal.164.

meskipun dalam bentuk rumusan akhir yang, menurut Adnan Buyung Nasution⁹, sama sekali bukan merupakan *constitutional guarantees* (penjamin legal yang kuat). Agaknya semangat kebersamaan di antara para anggota BPUPKI waktu itu begitu kuat sehingga perbedaan-perbedaan prinsipil sekali pun selalu mampu diakhiri dengan kesepakatan. Dalam hubungannya dengan apa yang diperjuangkan Hatta, hasilnya adalah dicantumkannya beberapa pasal tentang hak-hak dasar warganegara sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2), "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal 28, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal 31 ayat (1), "Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran". Pasal 31 ayat (2), "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang". Pasal 33 ayat (1), "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Pasal 31 ayat (2), "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Pasal 31 ayat (3), "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal 34, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".

⁹ Yang dimaksud adalah rumusan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diakhiri dengan kata-kata "ditetapkan dengan UU", yang kemudian menjadi Pasal 28 UUD 1945; lihat Adnan Buyung Nasution, "Bung Hatta: Simbol Daulat Rakyat di Indonesia", dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *ibid.*, hal. 188.

Substansi dari pasal-pasal di atas adalah bahwa Hatta memberikan sumbangan pemikiran bagi terbentuknya Indonesia merdeka yang berbentuk demokrasi sosial, yang mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Hatta menyebut negara seperti ini sebagai "negara pengurus". Wujud konkritnya adalah sistem demokrasi parlementer untuk menjamin demokrasi politik dan penerapan paham sosialisme dalam kehidupan ekonomi.

Yang terakhir ini menyangkut peranan pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan ekonomi. Sebagaimana diketahui, dalam kehidupan ekonomi, prinsip sosialis mengamanatkan pengendalian kehidupan ekonomi oleh negara. Bagi Hatta, pengendalian tersebut adalah dalam bentuk penguasaan oleh negara (BUMN) atas sektor-sektor ekonomi yang besar dan strategis, penguasaan oleh koperasi atas sektor ekonomi kerakyatan serta peranan sektor swasta sebagai pelengkap¹⁰.

5. Hatta, Islam dan Negara

Bagaimana wujud Islam dalam konsep kenegaraan Hatta? Dari uraian sebelumnya sudah dapat dilihat bagaimana Hatta memandang hubungan Islam dengan negara. Islam bagi Hatta adalah agama individual, yaitu usaha orang per orang dalam memahami, menghayati dan menafsirkan ajaran Islam, berbekal pengalaman dan kemampuan masing-masing. Dengan latar belakang pengalaman dan kemampuan intelektualnya, Hatta memiliki penafsiran sendiri tentang Islam serta

¹⁰ Lihat kumpulan pidato ilmiah Hatta yang berjudul *Membangun Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Inti Idayu Press), 1985, hal. 63.

posisinya dalam kehidupan bernegara. Pertama, Hatta memandang Islam secara hakiki, berpangkal pada keyakinan tentang ajaran tauhid atau ke-Esaan Tuhan, Tuhan YMK, juga Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa tugas dan tanggungjawab utama pemeluk Islam adalah berbuat baik terhadap sesama. Yang dimaksud adalah memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, perdamaian, keadilan dan persaudaraan dalam kehidupan bersama. Hal yang sama dikemukakan oleh Nurcholish Madjid. Dalam tulisannya yang sugestif¹¹, modernis Islam ini menyinggung cara beragama Hatta yang rasional tapi pekat dengan kesalahan substansial, yang mendekatkan Hatta dengan ide-ide tentang kemaslahatan umum, keadilan dan demokrasi atau sosialisme religius. Dasar penilaian Nurcholish Madjid adalah pernyataan Hatta bahwa¹²:

"The justice advocated by the Islamic religion is a social justice which can only be realized when mankind is free from all oppression. Moreover, since fraternity and a life of mutual help can only be realized in a socialist society, the leaders of Islamic religion felt that 'it was the mission of the Islamic religion to build a socialist society in Indonesia'" (Keadilan yang diperjuangkan Islam adalah keadilan sosial yang hanya dapat diwujudkan apabila umat manusia terbebas dari semua bentuk penindasan. Lagi pula, karena persaudaraan dan hidup saling tolong-menolong hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat sosialis, para pemuka agama Islam merasa bahwa 'menjadi misi agama Islam untuk membangun masyarakat sosialis di Indonesia').

Dengan demikian, bagi Hatta, Islam tidak wujud dalam arti ekspresi dominan secara legal-formal dan kelembagaan, melainkan wujud dalam bentuk sikap dan

¹¹ Nurcholish Madjid, "Bung Hatta: Dari Demokrasi Minangkabau ke Demokrasi Indonesia", *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 3, no. 1, Januari-Juni 2002, hal. 82.

¹² *Ibid.*

perilaku umat yang memperjuangkan nilai-nilai kebaikan sebagai manifestasi keimanannya kepada Tuhan YME, yaitu perdamaian, keadilan dan persaudaraan bagi semua orang, bahkan semua umat manusia di dunia ini. Dalam ceramahnya di depan berbagai golongan masyarakat sejak tahun 1950an, Hatta seringkali menyinggung nilai-nilai universal ini sebagai tujuan hidup bersama yang harus diperjuangkan para penganut Islam. Misalnya, dalam pidato beliau yang berjudul *Islam dan Pembangunan Masyarakat*, disampaikan di depan Badan Kontak Organisasi Islam di Jakarta tanggal 31 Oktober 1958, Hatta mengemukakan sebagai berikut¹³:

"Dan kita perhatikan pula apa arti Islam. Islam, pertama: artinya damai, kedua: menuju semata-mata kepada Allah yang menjadikan semuanya. Ini berarti bahwa kewajiban kita dalam dunia ini ialah menjalankan perintah Tuhan untuk mencapai masyarakat yang baik".

Secara sederhana dapat dikemukakan, Hatta menolak konsepsi negara Islam bagi Indonesia, tapi memperjuangkan wujudnya nilai-nilai Islam (perdamaian, keadilan dan persaudaraan) dalam kehidupan bernegara melalui sikap dan perilaku penganut-penganut Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, bagi Hatta, adalah menjadi tugas dan tanggungjawab umat yang beragama Islam untuk memperjuangkan nilai-nilai perdamaian, keadilan dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tugas dan tanggungjawab ini penting karena merupakan manifestasi keimanan kepada Tuhan YME.

Hatta dalam brosur *Demokrasi Kita* menggunakan ajaran Islam, khususnya nilai-nilai kebenaran dan keadilan Illahi, sebagai salah satu sumber konsepsinya

¹³ Lihat Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato III* (Jakarta: Inti Idayu Press), 1985, hal. 171.

tentang negara Indonesia yang demokratis¹⁴. Dua sumber yang lain adalah paham sosialisme Barat tentang perikemanusiaan dan persaudaraan dan ciri kebersamaan dan kekeluargaan masyarakat asli Indonesia. Dengan demikian, apabila Islam adalah sumber keyakinan etis bagi pemeluknya, negara bagi Hatta adalah aras atau medan pengabdian sebagai umat yang beriman kepada Tuhan YME. Negara yang dimaksud di sini adalah negara pengurus atau negara yang bercirikan demokrasi sosial, yaitu negara demokrasi yang mengendalikan kehidupan ekonomi demi kepentingan rakyat banyak, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya. Dengan kata lain, bentuk negara pengurus ini merupakan titik pertemuan konsepsi Hatta tentang Islam dan negara.

Dengan keyakinan seperti di atas, tidak mengherankan apabila Hatta menolak konsep negara Islam bagi Indonesia karena berpotensi merusak persatuan bangsa. Penolakan terhadap negara Islam ini tercermin dalam inisiatif Hatta untuk menghapus kata-kata "... dengan kewajiban menjalankan syari'ah Islam bagi pemeluknya" dalam rumusan Piagam Djakarta tahun 1945. Dalam masa-masa selanjutnya, Hatta tidak pernah mengidentifikasikan diri dengan sesuatu partai Islam sehingga oleh kawan-kawannya penganut agama nonIslam Hatta benar-benar diakui dan dihormati sebagai tokoh nasional yang berdiri di atas semua agama. Adalah benar bahwa pada tahun 1967 Hatta mendorong pembentukan PDII (Partai Demokrasi Islam Indonesia), yang kemudian tidak mendapat persetujuan dari pemerintah Orde Baru. Tapi, sebagaimana

¹⁴ DR. Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Pustaka Antara, P.T.), 1966, hal. 24.

dikemukakan Hatta sendiri¹⁵, tujuan utama pembentukan partai Islam tersebut adalah "... untuk mendidik umat Islam di Indonesia bagaimana sebaiknya berpartai dengan asas Islam itu di dalam suatu kehidupan demokrasi yang bertanggungjawab dalam suatu negara yang berdasarkan Pancasila".

6. Penutup

Kita telah menggambarkan bagaimana Hatta memahami Islam dan mengkaitkannya dengan kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Jelas terkesan dari penggambaran di atas bahwa, pertama, Hatta memandang Islam terutama sebagai agama individu-individu, bukan usaha kolektif yang berpotensi memaksakan keinginan, khususnya terhadap kelompok yang lemah. Ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianut Hatta bahwa individu memiliki hak-hak dasar yang perlu dilindungi, antara lain kebebasan dalam beragama. Bagaimana Islam tercermin dalam kehidupan bersama, bagi Hatta, tergantung pada bagaimana individu-individu penganut Islam ini memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Bagi Hatta jelas, Islam berpangkal pada ajaran tauhid bahwa Tuhan adalah Allah YME, yang menciptakan alam semesta ini untuk kehidupan manusia dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebagai konsekuensinya, penganut Islam wajib memelihara kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memperjuangkan perdamaian, keadilan dan persaudaraan, sebagai manifestasi tanggungjawabnya sebagai khalifah

¹⁵ Lihat Bung Hatta Menjawab, wawancara dengan Dr. Z. Yasni (Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk), 2002, hal. 177.

Tuhan yang harus menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Dengan demikian, tujuan-tujuan ini tidak dicapai melalui pendekatan kekuasaan, melainkan melalui amal kebaikan penganut-penganutnya. Hatta percaya, terwujudnya perdamaian, keadilan dan persaudaraan sebagai hasil dari usaha penganut-penganut Islam sama dengan wujudnya pengaruh Islam dalam kehidupan bersama.

Dalam kehidupan bernegara, kesimpulan di atas sekaligus menunjukkan kerangka kenegaraan apa yang dikehendaki Islam. Dengan melihat Islam dalam wujud tanggungjawab para pemeluknya, termasuk para pejabat negara yang beragama Islam, dalam berbuat kebaikan, yaitu memperjuangkan perdamaian dan keadilan serta persaudaraan bukan saja antar sesama penganut Islam, melainkan juga dengan semua golongan umat manusia pada umumnya, Hatta ingin menyebutkan bahwa, melalui perumusan kebijakan publik, negara berkewajiban menuntun rakyatnya dalam mewujudkan nilai-nilai yang sama bagi kesejahteraan rakyat. Bagi Hatta, negara pengurus (demokrasi sosial) adalah kerangka kenegaraan yang paling sesuai untuk mewujudkan nilai-nilai perdamaian, keadilan dan persaudaraan antar umat manusia sebagaimana yang diamanatkan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Bahtiar, "Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia", *PRISMA* No. 5, Mei 1995, hal. 3-28.
- Hatta, Mohammad, *Kumpulan Karangan (I)*, (Djakarta: Penerbit "Bulan Bintang), 1952.
- _____, *Demokrasi Kita* (Djakarta: Pustaka Antara, P.T.), 1966.
- _____, *Kumpulan Pidato III* (Jakarta: Inti Idayu Press), 1985.
- _____, *Membangun Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Inti Idayu Press), 1985.
- _____, *Indonesia Patriot: Memoirs* (Singapore: Gunung Agung Pte. Ltd), 1981.
- _____, *Bung Hatta Menjawab*, wawancara dengan Dr. Z. Yasni (Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk.), 2002.
- Kartodirjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, jilid 2 (Jakarta: Penerbit Gramedia), 1990.
- Madjid, Nurcholish, "Bung Hatta: Dari Demokrasi Minangkabau ke Demokrasi Indonesia", *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 3, no. 1, Januari-Juni 2002.
- Maliki, Zainuddin, "Menatap Masa Depan Politik Islam di Indonesia", *DIALOG*, edisi I Tahun 2004, hal. 1-11.
- Noer, Deliar "Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas", *PRISMA* No. 5, Tahun XVII, 1988, hal. 3-21.
- Stowasser, Barbara Freyer, " "Agama dan Perkembangan Politik: Antara Ibn Khaldun dan Machiavelli", Bagian Pertama, *Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. V, Tahun 1994, hal. 89-97.
- Swasono, Sri-Edi (ed.), *Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Hatta), 2002,